

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai inisiatif untuk peningkatan Kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh Negara Indonesia. Perkembangan kesehatan merupakan suatu cara strategis untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang ada pada masyarakat guna mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pasti melalui peningkatan kesadaran, kesiapan, serta kemampuan seluruh masyarakat untuk menjalani kehidupan yang sehat. Sebagian besar penduduk Indonesia, masih kesulitan mengakses layanan kesehatan baik di perdesaan maupun perkotaan, bahkan pada tingkat yang minim sekalipun. Ada banyak alasan untuk hal ini, termasuk faktor geografis, ekonomi, sosial, dan teknologi. Sementara itu, populasi perkotaan terus bertambah, sehingga menimbulkan sebuah masalah seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, perumahan dan pelayanan perkotaan yang tidak memadai, kejahatan, kekerasan, dan penyalahgunaan obat-obatan yang dilarang untuk digunakan. Akibatnya, kesehatan lingkungan selalu menurun seiring dengan berjalannya waktu. Apabila kita tidak cepat dalam menangani hal tersebut, maka hal ini akan menimbulkan dampak buruk pada kesehatan masyarakat. Perbaikan mutu yang ada pada bidang kesehatan merupakan cara yang baik dan strategis untuk menyediakan kebutuhan mendasar pada masyarakat dalam rangka mewujudkan peringkat kesehatan warga yang efektif dan maksimal. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mereka juga perlu termotivasi untuk menjalani hidup sehat. Kebersihan, kenyamanan, keamanan dan kesehatan merupakan syarat-syarat yang di perjuangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota. Untuk mencapai tujuan Kota Sehat, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapainya melalui berbagai tatanan dan kegiatan yang saling berhubungan dan disepakati bersama. Salah satu contoh aktivitas yang difasilitasi pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan sebuah forum atau wadah yang difasilitasi oleh lembaga masyarakat yang ada.

Kabupaten kota sehat adalah Kawasan yang terhindar dari kotor, aman, nyaman, dan sehat, yang hal ini dapat dicapai tidak hanya melalui forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kota, namun juga melalui kerja sama terpadu dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Forum adalah tempat dimana masyarakat dapat berpartisipasi dan menyampaikan keinginannya. Forum Kota Sehat membantu menetapkan tujuan dan menetapkan prioritas untuk membangun suatu lingkungan yang menggabungkan berbagai elemen, yang pada gilirannya akan menghasilkan lingkungan yang nyaman, aman, bersih, dan sehat untuk dihuni. Forum memiliki perannya sendiri dan diawasi olehnya. Misalnya, Forum Kabupaten Kota Sehat berfungsi sebagai wadah masyarakat di tingkat Kabupaten Kota yang melibatkan orang-orang dari berbagai komunitas di daerah tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat H (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat ditekankan bahwa. Hal ini dijadikan sebagai landasan untuk Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan berbagai kebijakan dan pedoman, termasuk di antaranya adalah pedoman penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Pedoman ini ditetapkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005 dan No. 1138/Menkes/PB/VIII/2005. Pedoman ini bertujuan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan di tingkat kabupaten/kota dengan mencakup aspek fisik, sosial, dan budaya. Selain itu, pedoman ini berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal, serta memberdayakan berbagai fungsi kehidupan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kota atau desa.

Kabupaten Kota Sehat berusaha untuk mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk kesehatan, lingkungan hidup, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap kota dan desa dapat menjadi lingkungan yang layak huni dan berdaya bagi penduduknya, serta mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, ada beberapa indikator yang digunakan. Indikator ini menunjukkan komponen penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat yang

dapat diamati dan diukur secara langsung. Terdapat tiga indikator dalam program Kabupaten Kota Sehat (KKS) tersebut. Yang pertama adalah Indikator Pokok atau Dasar, yang dipergunakan untuk menilai upaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan medasar atau utama bagi masyarakat. Yang kedua adalah pada Indikator Kelembagaan, yang digunakan untuk menilai kondisi kelembagaan dari berbagai jenis pihak. Hal ini mencakup pemerintah daerah, pemerintah kota, calon mitra, dan banyak aktor lain yang terlibat dalam pelaksanaan KKS, sebagaimana dibuktikan oleh undang-undang, rentenir, dan Undang-Undang.. Untuk menjalankan Kabupaten Kota Sehat, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas ketiga indikator tersebut (Pratama, 2021).

Predikat Swasti Saba merupakan sebuah penghargaan yang diperuntukkan bagi Kabupaten atau Kota yang telah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten atau Kota Sehat. Konsep kota sehat mengacu pada kota dimana penduduknya dapat hidup bersih, aman, nyaman, dan sehat. Implementasi konsep ini melibatkan berbagai kesepakatan kegiatan yang sudah di rencanakan dan disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) berkolaborasi dalam memberikan penghargaan ini. Penghargaan Swasti Saba merupakan simbol pengakuan kepada badan-badan lokal yang berkomitmen dan berhasil mencapai standar kabupaten/kota sehat.

Kabupaten Ponorogo, sebagai contoh pernah mendapatkan predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat ini karena telah berhasil mencapai berbagai kriteria yang ditetapkan dalam upaya menjadikan lingkungan tempat tinggal warganya menjadi lebih baik, sehat, dan layak huni. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo merupakan upaya strategis di era desentralisasi untuk mendorong potensi masyarakat dunia usaha atau swasta, akademis dan lembaga sosial masyarakat sehingga mampu mengatasi berbagai masalah lingkungan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Penghargaan Swasti Saba tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Masyakarat lokal telah diberikan Penghargaan Swasti Saba oleh Pemerintah melalui pejabat seperti Bupati atau Walikota sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian

mereka terhadap pelaksanaan program Kabupaten atau Kota Sehat. Penghargaan ini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat pencapaian Kabupaten/Kota Sehat: a) Sebagai bentuk penghargaan untuk pemantapan, Kabupaten atau Kota yang sudah memenuhi setidaknya dua dari kriteria pada Kabupaten atau Kota Sehat yang sudah ditetapkan, maka akan mendapatkan Kategori Padapa. b) Sebagai penghargaan untuk pembinaan, Kabupaten atau Kota yang sudah memenuhi setidaknya tiga hingga empat kriteria pada Kabupaten atau Kota sehat, maka akan mendapatkan Kategori Wiwerda. c) Sebagai penghargaan untuk pengembangan, Kabupaten atau Kota yang sudah memenuhi setidaknya lima kriteria pada Kabupaten atau Kota Sehat, maka akan mendapatkan Kategori Wistara. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong dan mengakui upaya-upaya dalam mencapai standar Kabupaten Kota Sehat yang telah ditetapkan (Mufti, 2022).

Setiap kategori penghargaan ini mencerminkan sejauh mana Pemerintah Daerah bersama masyarakatnya berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip Kabupaten/Kota Sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta pengembangan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penghargaan Swasti Saba ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai bentuk dari sebuah motivasi untuk terus meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kabupaten Ponorogo, yang terletak di Jawa Timur, telah melaksanakan program Kabupaten Sehat dengan fokus pada bidang kesehatan. Program ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar diciptakannya suasana kehidupan yang terbebas dari rasa kotor, aman, nyaman, dan sehat bagi penduduknya, dengan menggunakan penyelenggaraan program Kabupaten Sehat ini, Kabupaten Ponorogo berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam ajang penilaian Kabupaten Sehat. Penghargaan ini menandakan bahwa Kabupaten Ponorogo telah berhasil memenuhi standar tertinggi dalam implementasi program Kabupaten Sehat dengan mengindikasikan bahwa Kabupaten Ponorogo telah berhasil mengembangkan dan

menerapkan seluruh kriteria tatanan dari Kabupaten Sehat dengan baik. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tetapi juga menunjukkan komitmen dan kerja keras mereka dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan holistik dalam pembangunan kesehatan dan lingkungan. Penghargaan ini juga menjadi inspirasi dan contoh yang baik bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia dalam upaya mencapai status Kabupaten Sehat yang menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

Penghargaan Swasti Saba Wistara merupakan sebuah penghargaan yang mengacu pada bidang kesehatan lingkungan yang akan diberikan kepada Kota atau Kabupaten yang berhasil melaksanakan sejumlah aspek tatanan penilaian yang telah ditetapkan. Tatanan ini merupakan sasaran dalam upaya menciptakan Kabupaten atau Kota Sehat, yang telah disesuaikan berdasarkan pada kemampuan dan masalah yang ada di setiap Kecamatan dan terdapat di Kabupaten atau Kota tersebut. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berhasil memenuhi penyelenggaraan 9 perencanaan yang sudah tersusun untuk kawasan penilaian Kabupaten/Kota Sehat, antara lain: 1). Perencanaan Kesehatan dan Kemandirian Kehidupan Masyarakat, 2). Perencanaan Untuk Fasilitas Umum Serta Tempat Huni, 3). Perencanaan Satuan Pendidikan, 4). Perencanaan Pasar, 5). Perencanaan Perkantoran dan Perindustrian, 6). Perencanaan Pariwisata, 7). Perencanaan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan, 8). Perencanaan Perlindungan Sosial, 9). Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempertahankan predikat Kabupaten Sehat. Berbagai strategi telah dilakukan untuk mencapai hal ini, termasuk strategi yang mendasar seperti mendorong masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Di Ponorogo, kebiasaan masyarakat dalam menjaga air agar tetap bersih dan menjaga ketahanan pangan menjadi fokus utama. Mayoritas penduduk Ponorogo bekerja sebagai petani dan perkebunan, sehingga pengelolaan hasil panen yang layak dikonsumsi sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Upaya ini melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan penggunaan teknik yang aman dalam pengolahan hasil pertanian. Program-program ini dapat mencakup berbagai hal, seperti pelayanan kesehatan dasar, peningkatan infrastruktur sanitasi, pendidikan

kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat. Dengan terus menerapkan strategi ini dan mengintegrasikan berbagai program untuk memenuhi standar Kabupaten Sehat, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan prestasinya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.

Beberapa bentuk penelitian terdahulu yang membedakan penelitian para ahli terdahulu adalah, pertama, mempertahankan predikat Kabupaten Sehat. Kualitas lingkungan hidup dalam perubahan fisik, sosial, dan sikap masyarakat tentunya diperlukan berdasarkan keaktifan peran di masyarakat itu sendiri yang dimaksimalkan dengan cara dimbimbing, dipadu, dan diarahkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sugirah, A. 2019). Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha menciptakan lingkungan yang bebas dari kotor, aman, nyaman, dan sehat agar semua warganya termasuk masyarakat dapat memiliki tingkat kesehatan yang optimal serta menjalankan beberapa rencana dalam kesehatan dan cara lainnya yang dapat mendukung kesehatan. Upaya ini juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang aktif dalam segi sosial ataupun ekonomi.

Kedua, Kabupaten Sehat yang salah satu berfokus pada sebuah lingkungan hidup Masyarakat yang sehat serta mandiri dan sesuai dengan peraturan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mempertahankan predikat Swasti Saba Wistara. Kawasan masyarakat sehat merupakan sebuah kondisi wilayah yang bebas dari kotor, aman, nyaman, dan sehat untuk para pekerja serta masyarakat yang berada pada area tersebut. Caranya, yaitu dengan kemampuan Masyarakat dan para pekerja melalui keberdayaan Pembangunan terkait, serta pendapatan fasilitas perencanaan wilayah itu sendiri dengan tatanan dalam perilaku hidup yang bersih serta sehat. Cara itu harus dilakukan secara optimal, agar perumahan dan Pembangunan yang sehat, serta penyedia air bersih dapat terlaksana dengan baik (Adianto, D. Y, 2022).

Menurut para ahli tentang Kabupaten/Kota Sehat merupakan unsur penting yang tidak dapat diubah pada rencana Kota Sehat yang dapat dibagi menjadi dua kategori mencakup sumber yang luas, yaitu rencana tentang kesehatan dan rencana tentang

bagaimana cara mendapatkannya. Sedangkan, konsep yang berhubungan dengan kesehatan ada tiga yaitu pertama, konsep sehat yang positif, bukan berarti tidak ditemukannya penyakit. Kedua, konsep sehat ekologis, yang diperhitungkan pada semua faktor dan memiliki pengaruh pada kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu sebuah perhatian khusus dalam perbedaan kesehatan (Soedirham, 2012). Dapat ditarik Kesimpulan bahwa dalam penerapannya Kabupaten/Kota Sehat harus dilihat dan dipantau terhadap lingkup area pada semua kegiatan yang ada, serta pada area tersebut pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda (Saputro, 2021).

Seperti yang dikutip oleh Palutturi (2009), World Health Organization (WHO) mendefinisikan kota sehat sebagai berikut: lingkungan fisik yang bebas dari kotor dan aman; kestabilan ekosistem; komunitas yang kuat dan tidak eksploitatif; partisipasi serta pengontrolan Masyarakat yang kuat; kebutuhan dasar yang terpenuhi seperti makanan, air, rumah, dan pekerjaan yang aman; akses yang mudah ke fasilitas dan pengalaman; dan interaksi serta komunikasi yang aktif dan bebas (Ratodi, M. 2010).

Terdapat perbedaan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama untuk mempertahankan predikat kabupaten sehat memerlukan sebuah lingkungan fisik yang berkualitas, sosial, dan perilaku yang memiliki perubahan yang ada dalam masyarakat dan Pemerintah Daerah. Kedua, Kabupaten sehat berfokus pada kawasan masyarakat yang sehat melalui pemberdayaan pelaku pembangunan yang terkait dan perencanaan wilayah melalui indikator perilaku hidup sehat. Ketiga, dalam penerapannya Kabupaten/Kota Sehat akan diawasi dari lingkup kawasan dan semua kegiatan dalam kawasan itu sendiri. Sedangkan penelitian yang saya ambil berfokus pada bagaimana strategi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mempertahankan predikat kabupaten sehat.

Program Kabupaten Sehat merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah meraih pengakuan sebagai Kabupaten Sehat dalam dua periode berturut-turut. Oleh karena itu, sebagai seorang peneliti, saya tertarik untuk menjadikan judul penelitian saya tentang "Strategi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat", karena saya ingin memahami

bagaimana cara strategis yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap pencapaian prestasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan pemahaman, maka apabila membahas masalah yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dari Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat dan dapat memahami sejumlah aspek tatanan kawasan dalam penyelenggaraan Kabupaten sehat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan dapat meningkatkan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meraih predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat dengan baik.

b. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih paham tentang kebersihan lingkungan terutama dalam bidang kesehatan.

c. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis akan dapat mengetahui bagaimana strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat, dan kerjasama antara sektor-sektor dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Agar dalam penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Predikat Swasti Saba Kabupaten Sehat” ini memiliki kesamaan pemahaman mengenai konsep dan pengertian yang terkandung didalamnya, maka penulis perlu memaparkan penegasan istilah secara konseptual. Hal ini bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi secara jelas antar penulis dan pembaca. Berikut merupakan penegasan istilah dalam penelitian ini :

1. Strategi

Dalam bahasa Yunani, kata "strategi" itu sendiri berawal dari kata "strategos", yang memiliki makna "tentara" serta "ego", yang artinya "pemimpin." Suatu strategi mencakup rencana atau dasar agar tujuannya tercapai. Jadi, strategi pada dasarnya adalah cara agar tujuannya tercapai. Menurut Marrus (2002:31) “Strategi adalah suatu proses yang dilakukan oleh para pemimpin puncak untuk menetapkan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi, bersama dengan pembuatan rencana atau tindakan untuk mencapainya. Rencana ini mencakup tujuan, kebijakan, dan langkah yang harus diambil oleh sebuah perusahaan untuk bertahan hidup serta menenangkan persaingan, apalagi ketika Perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang unggul dan kompetitif.” (Juliansyah, 2017).

2. Swasti Saba

Pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005 dan No. 138/Menkes/PB/VIII/2005 Swasti Saba merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat daerah melalui Bupati/Walikota atas kesuksesannya dalam melaksanakan Kabupaten Sehat.

F. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Publik

(Dunn, 2018) menyebutkan bahwa istilah evaluasi bisa disamakan bersama dengan evaluasi, pemerinkatan, dan evaluasi. Ciri Evaluasi yang dapat dibedakan dengan dengan analisis adalah saling ketergantungan nilai, fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lalu, serta dualitas nilai. Evaluasi kebijakan melibatkan dua aspek yang saling terkait: perbedaan cara memandang hasil kebijakan serta program publik, serta penerapan rangkaian penilaian agar dapat melihat hasil yang dicapai. Evaluasi kebijakan terbagi menjadi 3 kategori tergantung pada evaluasi, diantaranya yaitu “sebelum”, “waktu dilaksanakan” dan “saat setelah dilaksanakan”. Evaluasi pada saat implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses atau evaluasi, namun ketika suatu kebijakan diimplementasikan maka dikatakan evaluasi terhadap keluaran atau evaluasi terhadap hasil atau hasil kebijakan, atau evaluasi terhadap efektifitas kebijakan tersebut. (Debby D. V. Kawengian, 2015).

William N. Dunn dalam bukunya *Publik Policy Analysis An Integrated Approach* (2018) mengatakan bahwa “...where evaluation refers to production of information about the value or worth of policy outcomes. When policy outcomes do in fact have value, it is because they contribute to goals and objectives. In this case, we say that a policy or program has attained some significant level of performance.” Dapat ditarik Kesimpulan yaitu bahwasanya Tujuan evaluasi adalah untuk pengukuran kebijakan, apakah telah memberikan pengaruh dan apakah program kebijakan telah

berhasil. Dijelaskan bahwa evaluasi jenis ini mempunyai ciri jenis yang bisa membedakannya dengan metode analisis kebijakan yang lain, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Value Focus*: Evaluasi adalah sebuah usaha yang menentukan manfaat sosial dan kegunaan kebijakan dan program. Bukan hanya tentang pengumpulan informasi tentang konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan dari tindakan kebijakan, karena kesesuaian tujuan dan sasaran kebijakan selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup langkah-langkah untuk menilai tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) *Fact-value interdependence*: Nilai persyaratan evaluasi ditentukan oleh “fakta” dan “nilai”. Hal tersebut dinyatakan bahwa suatu kebijakan atau program tertentu sudah mencapai pada peningkatan kinerja tertinggi (atau terendah) dan memerlukan lebih dari sekedar hasil kebijakan yang bernilai bagi semua individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengungkapkan hal ini, kita perlu menunjukkan bahwa hasil kebijakan yang sebenarnya adalah hasil dari tindakan yang diambil untuk memecahkan permasalahan tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat untuk evaluasi.
- 3) *Present and past orientation*: Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokasi karena tuntutan tersebut fokus pada hasil saat ini dan masa lalu dibandingkan hasil di masa depan. Evaluasi akan dilakukan secara surut setelah tindakan penanggulangan dilaksanakan. Rekomendasi, yang juga mencakup asumsi nilai, bersifat berwawasan ke depan dan dibuat sebelum tindakan diambil.
- 4) *Value Duality*: Nilai-nilai yang mendasari persyaratan penilaian mempunyai sifat ganda, karena dipandang sebagai tujuan dan sarana. Evaluasi serupa dengan rekomendasi karena berkaitan dengan nilai yang melekat dan dapat dianggap intrinsik (diperlukan untuk kepentingannya sendiri) atau ekstrinsik (diperlukan karena mempengaruhi tujuan lain). Nilai sering kali disusun dalam struktur hierarki yang mencerminkan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran (Dunn, 2018)

Evaluasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam mengevaluasi kebijakan publik. Sebab, evaluasi mempunyai fungsi yang mengakibatkan perlunya

melakukan evaluasi terhadap kebijakan. William N. Dunn menjelaskan bahwa rating memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- 1) *First, and most important, evaluation provides reliable and valid information about policy performance, that is, the extent to which needs, values, and opportunities have been realized through public action. In this respect, evaluation reveals the extent to which particular goals (e.g, improved health) and objectives (e.g, a 2-percent reduction of chronic diseases by 1990) have been attained.* Evaluasi memberikan informasi apakah suatu kebijakan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) *Second, evaluation contributes to the clarification and critique of values that underlie the selection of goals and objectives.* Evaluasi ini berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pada pilihan tujuan dan sasaran pada kebijakan publik.
- 3) *Third, evaluation may contribute to the application of other policy-analytic methods, including problem structuring and prescription.* Evaluasi ini berkontribusi pada penerapan teknik analisis kebijakan seperti struktur dan peresapan.

Evaluasi kebijakan publik menggunakan pengembangan berbagai indikator selama tahap implementasi untuk menghindari munculnya bias dan berfungsi sebagai indikator dan panduan bagi para evaluator. Standar yang ditetapkan menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. (Dunn, 2018) mengajukan beberapa kriteria pilihan kebijakan yang identik dengan kriteria evaluasi kebijakan. Kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

No	Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1	Efektivitas (<i>Effectiveness</i>)	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan.
2	Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	Berapa banyak dipergunakan sumber daya?	Biaya unit Keuntungan bersih

			Rasio biaya-keuntungan
3	Kecukupan (<i>Adequacy</i>)	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?	Biaya tetap (Masalah Tipe I) Efektivitas tetap (Masalah Tipe II).
4	Pemerataan (<i>Equity</i>)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor–Hicks Kriteria Rawls.
5	Responsivitas (<i>Responsiveness</i>)	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga.
6	Ketepatan (<i>Appropriateness</i>)	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik seharusnya merata sekaligus efisien.

Sumber: (Dunn, 2018)

Menurut pendapat Dunn terhadap kriteria tersebut, dapat dijelaskan 6 kriteria tersebut yaitu:

1. Efektivitas (*Effectiveness*) berhubungan pada apakah alternatif tersebut telah mencapai hasil yang diharapkan (outcome) atau mencapai tujuan tindakan. Efektivitas, yang erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dalam satuan produk atau jasa atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*Efficiency*) berhubungan pada upaya yang diperlukan agar dapat mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan upaya, yang terakhir umumnya diukur dalam bentuk biaya moneter.

3. Kecukupan (*Adequacy*) berhubungan pada seberapa baik tingkat efektivitas dalam memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, dan peluang yang menimbulkan masalah. Kriteria kesesuaian menekankan kekuatan hubungan diantara alternatif kebijakan serta hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan (*Equity*) erat berhubungan pada rasionalitas hukum dan sosial yang mengacu pada distribusi hasil dan upaya di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang terikat dalam pemerataan ini yaitu kebijakan yang hasil (misalnya moneter) atau upaya (misalnya biaya moneter) didistribusikan secara adil.
5. Responsivitas (*Responsiveness*) berhubungan pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat tertentu. Sekalipun seorang analis memenuhi seluruh kriteria lain seperti efektivitas, efisiensi, relevansi, dan integritas, ia tetap akan gagal jika ia tidak menanggapi kebutuhan nyata kelompok yang seharusnya mendapatkan manfaat dari standar ketanggapan tersebut penting.
6. Ketepatan (*Appropriateness*) berhubungan pada kriteria kesesuaian dan berkaitan erat terhadap rasionalitas substantif karena pertanyaan mengenai kesesuaian politik bukan mengenai serangkaian kriteria individual, namun tentang kombinasi dua kriteria atau lebih. Ketepatan mengacu pada nilai tujuan program dibandingkan dengan kekuatan asumsi yang mendasari tujuannya.

Evaluasi kebijakan lebih menekankan pada penciptaan dasar pemikiran dari suatu pelaksanaan kebijakan. Hasil dari dasar pemikiran digunakan sebagai bahan utama dalam mengevaluasi suatu kebijakan, sehingga dalam melaksanakan tahap-tahap evaluasi sudah memberikan jawaban terkait dasar pemikiran sebelumnya (Cahyono, 2021).

G. Definisi Operasional

1. Kebijakan Publik

Menurut pendapat Dunn terhadap kriteria tersebut, dapat dijelaskan 6 kriteria tersebut yaitu:

1. Efektivitas (*Effectiveness*) berhubungan pada apakah alternatif tersebut telah mencapai hasil yang diharapkan (outcome) atau mencapai tujuan tindakan. Efektivitas, yang erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dalam satuan produk atau jasa atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*Efficiency*) berhubungan pada upaya yang diperlukan agar dapat mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan upaya, yang terakhir umumnya diukur dalam bentuk biaya moneter.
3. Kecukupan (*Adequacy*) berhubungan pada seberapa baik tingkat efektivitas dalam memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, dan peluang yang menimbulkan masalah. Kriteria kesesuaian menekankan kekuatan hubungan diantara alternatif kebijakan serta hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan (*Equity*) erat berhubungan pada rasionalitas hukum dan sosial yang mengacu pada distribusi hasil dan upaya di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang terikat dalam pemerataan ini yaitu kebijakan yang hasil (misalnya moneter) atau upaya (misalnya biaya moneter) didistribusikan secara adil.
5. Responsivitas (*Responsiveness*) berhubungan pada sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat tertentu. Sekalipun seorang analis memenuhi seluruh kriteria lain seperti efektivitas, efisiensi, relevansi, dan integritas, ia tetap akan gagal jika ia tidak menanggapi kebutuhan nyata kelompok yang seharusnya mendapatkan manfaat dari standar ketanggapan tersebut penting.
6. Ketepatan (*Appropriateness*) berhubungan pada kriteria kesesuaian dan berkaitan erat terhadap rasionalitas substantif karena pertanyaan mengenai kesesuaian politik bukan mengenai serangkaian kriteria individual, namun

tentang kombinasi dua kriteria atau lebih. Ketepatan mengacu pada nilai tujuan program dibandingkan dengan kekuatan asumsi yang mendasari tujuannya.

Evaluasi kebijakan lebih menekankan pada penciptaan dasar pemikiran dari suatu pelaksanaan kebijakan. Hasil dari dasar pemikiran digunakan sebagai bahan utama dalam mengevaluasi suatu kebijakan, sehingga dalam melaksanakan tahap-tahap evaluasi sudah memberikan jawaban terkait dasar pemikiran sebelumnya (Cahyono, 2021).

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, serta dokumen resmi lainnya adalah sumber data yang dipakai dari penelitian kualitatif. Agar mencapai tujuan menggambarkan realita yang empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan menyeluruh, penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif untuk mencocokkan realita empirik dengan teori yang relevan (Lexy J Moeleong, 2004). Penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk "mengukur", sedangkan penelitian kualitatif biasanya dipakai terhadap "eksplorasi". Akademisi matematika dan ilmu pengetahuan alam biasanya menggunakan yang pertama (Darmalaksana, 2020)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang terpilih untuk penelitian ini merupakan tempat yang dipakai peneliti agar mempunyai suatu data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Untuk penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten/Kota Ponorogo. Untuk peneliti ini menentukan lokasi sebagai data awal guna mengetahui Kabupaten Ponorogo yang pernah meraih penghargaan Swasti Saba.

3. Teknik Penentuan Informan

1. Data Primer

Hasil wawancara digunakan oleh peneliti dari narasumber yang telah di dapatkan dari beberapa informan mengenai topik penelitian yang relevan sebagai data primer.

1. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Ponorogo. Perannya dalam perencanaan serta pengembangan pada pembangunan di tingkat daerah. Program Kabupaten Sehat menekankan pentingnya integrasi berbagai sektor untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bappeda bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan yang mencakup aspek-aspek tersebut, sehingga terlibat dalam mendukung implementasi program Kabupaten Sehat melalui perencanaan strategis dan pengawasan pelaksanaan program tersebut.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai penyedia layanan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan penanganan penyakit memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait pola hidup sehat, sanitasi, gizi, dan upaya pencegahan penyakit. Pengendalian faktor-faktor lingkungan yang berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat, seperti sanitasi lingkungan, kualitas air minum, dan pengelolaan limbah.
3. Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat. Bertanggung jawab dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Melalui Kabupaten Sehat, mereka dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar seperti bantuan sosial, perlindungan anak, rehabilitasi sosial.
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Meskipun tidak berfokus langsung pada aspek kesehatan medis, keterlibatan Dinas Pariwisata dalam program

Kabupaten Sehat dapat membantu membangun lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, promosi kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata yang sehat dan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung bersumber pada pemberian data tersebut kepada orang yang telah mengumpulkan, seperti melalui dokumen dan sumber lainnya. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan dapat berupa buku, referensi jurnal, dan berbagai artikel yang mendukung dan sesuai terhadap topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan percakapan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Percakapan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak: pewawancara, sebagai seseorang yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai, dan orang yang diwawancarai, yang akan menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oleh karena itu, ketika melakukan sebuah wawancara, peneliti menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis yang juga memberikan alternatif jawaban (Thalib, 2022).

Proses wawancara biasanya dilakukan dalam enam tahap: menentukan fenomena atau masalah penelitian yang akan diteliti tersebut; membuat desain wawancara, termasuk pertanyaan dan protokol wawancara; melakukan wawancara dengan narasumber; transkripsi dan translasi; analisis data wawancara; dan pelaporan.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam proses, yang melibatkan berbagai aktivitas perhatian terhadap objek yang diamati dikenal sebagai "observasi". Karena fokus penelitian belum jelas, observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak struktur. Fokus observasi akan berkembang selama proses observasi. Akibatnya, peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, menyimpan informasi yang menarik, melakukan analisis, dan kemudian sampai pada kesimpulan. (Ii, 2019).

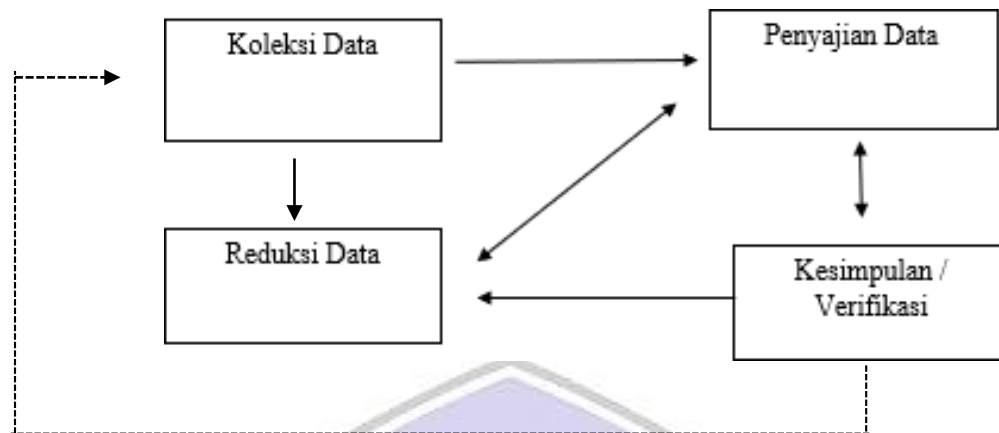
3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dianggap sebagai jenis data sekunder dalam hal ini, yaitu dokumen yang diperlukan untuk mendukung data penelitian. Mengumpulkan sejumlah dokumen yang akan diperlukan sebagai bahan data informasi terkait dengan masalah penelitian dikenal sebagai studi dokumentasi, menurut Endang Danial (2009: 79). Moleong (1998:161) menyatakan bahwa "dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan."

5. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam penelitian untuk menemukan solusi. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk melakukan analisis data, yang merupakan proses mengorganisasikan urutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan raian dasar. Di sisi lain, metode kualitatif menghasilkan data deskriptif tentang subjek dan perilaku mereka yang diamati.

Menurut Miles dan Huberman, "model interaktif terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data, jalin-menjalin dilakukan".



Gambar 1.1 Skema Proses Analisis Data

Sumber : (Sugiyono, 2019)

- *Data reduction* (reduksi data)

Suatu seleksi, serta pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada.

- *Data display* (penyajian data)

Rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan.

- *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Setelah data dikategorikan, tema dan pola dicari sebelum kesimpulan ditarik. Kesimpulan awal yang disampaikan hanya sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2019).

4. Keabsahan Data

Menurut Moleong (2002), keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (credibility), yang dapat dicapai melalui teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan teman sejawat. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data penelitian hanya dapat dinyatakan valid jika tidak ada

perbedaan antara fakta yang diamati dan yang dilaporkan peneliti. Modal awal yang sangat berharga untuk sebuah penelitian adalah data yang dikumpulkan untuk dianalisis, yang akan digunakan sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Karena posisi data yang sangat penting, sangat penting untuk memastikan keakuratannya. Jika ada data yang salah, itu akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga; sebaliknya, jika ada data yang benar, itu akan menghasilkan kesimpulan yang benar dari hasil penelitian. Validitas data adalah istilah yang mengacu pada keabsahan data.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha mendapatkan data yang benar. Untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan data yang benar, peneliti harus memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar-benar valid. Teknik pemeriksaan diperlukan untuk memastikan keabsahan data. Sejumlah kriteria tertentu menentukan metode pemeriksaan. Ada empat kriteria yang dapat digunakan: tingkat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

